

**TAHUN  
2021**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



## **KEMANTREN NGAMPILAN**

**Jl. Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta, 55262**

**No. Telp/No. Faks : (0274) 376984**

**Alamat Email : ng@jogjakota.go.id**

# Kata Pengantar



Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Ngampilan Tahun 2021. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Kemantren Ngampilan Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKIP Kemantren Ngampilan Tahun 2021 merupakan bentuk Akuntabilitas Publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Ngampilan Tahun 2021 ini berisi tentang Komitmen Pencapaian Kinerja Kemantren Ngampilan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan terhadap Sasaran Startegis Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Ngampilan ini masih belum sempurna, untuk itu saran kritik masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki Pencapaian Kinerja Kemantren Ngampilan di masa mendatang. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Ngampilan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kemantren Ngampilan.

Mantri Pamong Praja Ngampilan

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE. MM.  
NIP. 196808221995032002



# Ikhtisar Eksekutif

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kemantren Ngampilan Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kemantren Ngampilan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kemantren Ngampilan Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Tujuan pembuatan LKJIP Kemantren Ngampilan adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Kemantren Ngampilan dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam jangka menengah dan jangka panjang sesuai dalam rencana pembangunan daerah baik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Ringkasan prestasi kinerja Kemantren Ngampilan yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Saran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu indikator sasaran ini adalah tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kemantren Ngampilan memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum kepada masyarakat, berkewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam rangka mendukung sasaran ini Kemantren Ngampilan melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada penciptaan *Good goverment* dan *Good Governance* yang mengedepankan kepastian prosedur, layanan, pembiayaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.



- Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Beberapa indikator dari sasaran ini adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Peningkatan Mutu (SPM), penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dan persentase penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Kemantren Ngampilan sebagai penyelenggara layanan masyarakat sangat berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan sasaran ini selaras dengan misi 1 Walikota Yogyakarta yang berupaya menumbuhkan keberdayaan warga masyarakat. Kemantren Ngampilan merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung misi ini sehingga upaya yang dilakukan juga selaras dengan sasaran 4 Kemendagri. Meskipun demikian untuk bidang ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran hanya sebagai *supproting unit* dari Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Yogyakarta.

- Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Kemantren Ngampilan memiliki kewenangan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat karena kelurahan merupakan bagian dari kemantren. Dalam mendukung sasaran ini Kemantren Ngampilan melakukan beberapa langkah :

1. Melakukan pembinaan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
  2. Melakukan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
  3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPP
  4. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.
- Sasaran 4: Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.



Kemantren Ngampilan sebagai ujung tombak dan garda depan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran ini karena kemantren menjadi penggerak bagi warga masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan melalui perekaman KTP Elektronik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan database kependudukan yang akurat. Kegiatan yang dilakukan Kemantren Ngampilan untuk mendukung sasaran ini adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dan memanfaatkan forum –forum pertemuan warga untuk memberikan informasi pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat dan pentingnya perekaman E-KTP sebagai *single identity* untuk pengurusan semua dokumen. Kemantren Ngampilan melakukan pelayanan perekaman E-KTP dan melakukan distribusi serta verifikasi data kependudukan, hal ini merupakan bagian dari fungsi Kemantren Ngampilan sebagai penyelenggara layanan umum.

Dapat disimpulkan bahwa Kemantren Ngampilan memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian target nasional khususnya sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri karena Kemantren Ngampilan memiliki kewenangan terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan memiliki keterkaitan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi garda depan validasi dan akurasi data kependudukan.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kemantren Ngampilan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran lainnya dari Kementerian Dalam Negeri meskipun tidak secara langsung karena kewenangan yang ada di Kemantren Ngampilan bersifat parsial dan hanya mendukung output dari instansi teknis.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kemantren Ngampilan ke depan, sebagai berikut:

1. Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas



2. Program dan kegiatan yang belum memberikan kemanfaatan yang signifikan bagi kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelatihan/bimtek ketrampilan
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi.
5. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang parsial sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat kurang optimal.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kemantren Ngampilan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	5
1.4 Keadaan Pegawai.....	6
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	8
1.6 Keuangan.....	11
1.7 Sistematika LKjIP.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	13
2.1 Perencanaan Strategis.....	13
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	19
2.3.1 Target Belanja kemantren Ngampilan.....	20
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	20
2.4 Istrumen Pendukung.....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	22
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	27
3.2.1 Analisa per sasaran strategis .....	27
3.3. Realisasi Anggaran.....	39
3.4. Akuntabilitas Anggaran.....	43
3.5. Inovasi.....	47
3.6. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	49
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b> .....	51





# Daftar Tabel



Tabel I.1 Data pegawai Kemantren Ngampilan.....	6
Tabel I.2 Data pegawai yang sudah mengikuti diklat penjenjangan.....	7
Tabel I.3 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	8
Tabel I.4 data Pegawai Berdasarkan Jabatan Eselonisasi .....	8
Tabel I.5 Sarana prasarana Kemantren Ngampilan tahun 2021.....	9
Tabel II.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2021.....	14
Tabel II.2 Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan.....	16
Tabel II.3 Strategi,Program dan Kegiatan.....	16
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (murni) .....	17
Tabel II.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	18
Tabel II.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	18
Tabel II.7 Capaian dari sasaran strategis Tahun 2021 .....	19
Tabel II.8 Target Belanja Kemantren Ngampilan APBD PerubahanTahun 2021 ...	20
Tabel II.9 Anggaran belanja Langsung per Sasaran strategis .....	20
Tabel II.10 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah kebijakan .....	21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	22
Tabel III.2 Capaian Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	23
Tabel III.3 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	25
Tabel III.4 Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota YogyakartaTahun 2020.....	28
Tabel III.5 Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	29
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	37
Tabel III.7 Pencapaian IKU Kemantren Ngampilan Tahun 2021.....	37
Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	38
Tabel III.9 Realisasi Anggaran Kemantren Ngampilan Tahun 2021.....	39
Tabel III.10 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan Target capaian Tahun 2021.....	40
Tabel III.11 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021.....	42
Tabel III.12 Analisis efisiensi .....	43
Tabel III.13 Realisasi Pelaksanaan Program Tahun 2021.....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKJIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (PD) Kemantren Ngampilan Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (PD) Kemantren Ngampilan Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kemantren Ngampilan
2. Mendorong Kemantren Ngampilan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kemantren Ngampilan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kemantren Ngampilan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1 Struktur Organisasi

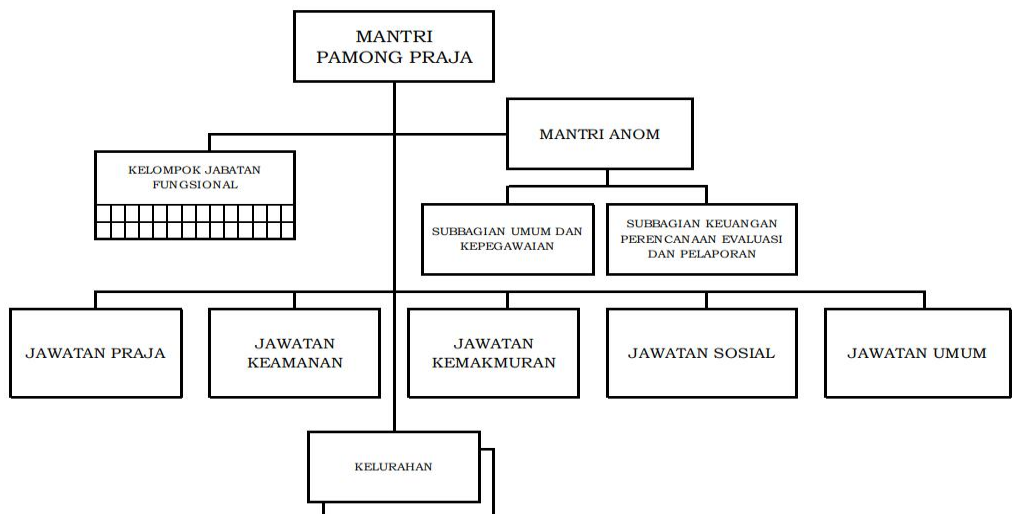
Struktur Organisasi Kemantren Ngampilan sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta terdiri dari :

- a. Mantri Pamong Praja;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Umum; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

**Gambar : 1 : Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kemantren Ngampilan**



## 1.2. Tugas pokok dan Fungsi

Kemantren mempunyai tugas pokok yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemantren mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan



- Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
  - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Tugas pokok fungsi yang lain Kemantren Ngampilan sebagaimana huruf l tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada mantri pamong praja untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada mantri pamong praja untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dilimpahkan kepada mantri pamong praja oleh Walikota adalah:

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Mediasi
- i. Penyelenggaraan dan
- j. Kewenangan lain.



### 1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi kemantren Ngampilan, antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan pemerintah yang cepat dan praktis berbasis android

Pada era teknologi informasi yang berbasis penggunaan teknologi android telah diaplikasikan dalam berbagai sisi kehidupan dan pelayanan publik, tidak terkecuali masyarakat Kota Yogyakarta juga mengharapkan sebuah pelayanan dari pemerintah yang serba cepat untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Upaya Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat di tengah persaingan global yang serba cepat.

Di tengah era persaingan kehidupan masyarakat dunia global yang serba mendunia di segala bidang maka masyarakat Kota Yogyakarta membutuhkan modal peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai untuk menghadapi persaingan di segala bidang tersebut. Sehingga upaya pemerintah untuk membantu peningkatan keberdayaan masyarakat dituntut untuk lebih efektif dan tepat sasaran dan tepat guna.

3. Tergantikannya paradigma lama “Bekerja alon-alon waton kelakon” dengan perkembangan paradigma baru “Kerja cepat, tepat dan selamat”. Ini merupakan tantangan untuk seluruh pegawai untuk senantiasa sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasannya. Hal ini dimaksudkan bahwa semua komponen pegawai pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan kemampuannya untuk mengejar perkembangan teknologi informasi dan perkembangan zaman yang serba cepat untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, efektif, efisien dan akuntable sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.



#### 1.4. Keadaan Pegawai

Kebijakan moratorium terkait penambahan jumlah pegawai negeri yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri berpengaruh terhadap jumlah aparatur sipil negara yang semakin berkurang. Keterbatasan personil menyebabkan jumlah pegawai di masing-masing perangkat daerah kurang sesuai dengan Analisis Jabatan (anjab) yang seharusnya. Demikian halnya di Kemantren Ngampilan jumlah aparatur sipil negara di kemantren dan kelurahan sangat minim sehingga jumlah yang ada harus dioptimalkan agar pelaksanaan tugas tetap dapat berjalan dengan baik. Kondisi yang demikian semakin berat setelah diberlakukannya TPP penuh tanpa Honorarium bagi pegawai telah melahirkan kecenderungan baru dengan munculnya banyak pelimpahan tugas ke wilayah kemantren yang ditengarai sebagai upaya mengurangi anggaran dan beban kerja dari OPD lain (terutama Dinas maupun Badan). Sehingga beban ketugasan di Wilayah semakin berat. Keadaan ini memerlukan strategi untuk mengoptimalkan potensi masing-masing pegawai dengan memberikan motivasi kerja dan menerapkan ketugasan rangkap bagi pegawai. Hal ini penting untuk dilakukan karena SDM sangat berpengaruh langsung terhadap pencapaian arah, tujuan dan sasaran instansi.

Jumlah aparatur sipil negara yang ada di Kemantren Ngampilan sebanyak 37 orang, terdiri dari 23 orang pegawai tetap (PNS) dan 14 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan). Keadaan personil Kemantren Ngampilan per 30 Desember 2021 sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**DATA PEGAWAI KEMANTREN NGAMPILAN**

No.	Uraian Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1.	Mantri pamong praja	-	1	-	-	1	1
2.	Mantri Anom	1	-	-	1	-	1



3.	Kepala Jawatan	1	4	-	5	-	5
4.	Kasubag	-	2	-	2	-	2
5.	JFU kemantren	2	2	2	2	-	4
6.	JFT kemantren	1	-	-	1	-	1
7.	Naban kemantren	2	1	-	-	-	3
8.	Lurah	1	1	-	2	-	2
9.	Sekretaris kelurahan	2	-	-	2	-	2
10.	Kasi Kelurahan	3	5	-	8	-	8
11.	JFU kelurahan	-	-	-	-	-	-
12.	Naban kelurahan	-	-	-	-	-	-
13.	Tenaga Teknis Kemantren	2	1	-	-	-	3
14.	Tenaga Teknis Kelurahan	4					4
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>37</b>

Sumber data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian , Des 2021

**Tabel I.2**

**DATA PEGAWAI YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT PENJENJANGAN**

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	0	1
2	Diklatpim IV	19	11	8
5	Struktural yang belum diklat	0	2	3
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>11</b>

Sumber data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2021





Tabel I.3

## DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – laki	Perempuan
1	S2	2	-	2
2	S1	16	7	9
3	D III	2	1	1
4	SLTA	1	1	-
5	SLTP	-	-	-
6.	SD	1	1	-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

Sumber data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2021

Tabel I.4

## DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN ESELONISASI

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	III A	1	-	1
2	III B	1	1	-
3	IV A	7	2	5
4	IV B	10	5	5
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Sumber data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2021

Apabila dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi yang ada, masih membutuhkan adanya penambahan minimal 17 orang personil, terutama unsur staf pembantu dari masing-masing seksi maupun sekretariat.



### 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan sarana pendukung kelancaran pelayanan dan penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan, baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah sarana dan prasarana kerja yang terinventarisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas di Kemantren Ngampilan sebagai berikut :

**Tabel I.5**

**SARANA PRASARANA KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2021**

NO.	JENIS/NAMA BARANG	KEMANTREN	KELURAHAN	JUMLAH	KONDISI
1.	Gedung Kantor Kemantren	1	0	1	Baik
2.	Pendopo Kemantren	1	0	1	Baik
3.	Rumah Dinas MPP	1	0	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	2	0	2	Baik
5.	Pendopo Kelurahan	1	-	1	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	0	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3i	1	0	1	Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	14	0	14	Baik
9.	Sound System	2	0	2	Baik
10.	Wireless / Sound System	1	0	1	Baik
11.	Telepon	4	0	4	Baik
12..	Telepon 3 digit	1	2	3	Baik
13.	Laptop	4	3	7	Baik
14.	Komputer	14	4	18	Baik



15.	Notebook	1	0	1	Baik
16.	Komputer Tablet	0	0	0	Baik
17.	PC Kiosk	1	0	1	Baik
18.	Ruang Rapat	4	0	4	Baik
19.	AC	9	0	9	Baik
20.	Almari	33	0	33	Baik
21.	Kursi	491	0	491	Baik
22.	Meja	68	0	68	Baik
23.	Meja Komputer	2	0	2	Baik
24.	Printer	13	2	13	Baik
25.	Sepeda	2	4	6	Baik
26.	Sepeda Listrik	0	0	0	Baik
27.	Kamera	1	0	1	Baik
28.	Radio	1	0	1	Baik
29.	Televisi	3	1	4	Baik
30.	Alat Pemadam Kebakaran	37	0	37	Baik

*Sumber data : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian, Des 2021*



Sebagai langkah optimalisasi dan upaya peningkatan pelayanan maka perlu dilakukan:

1. Penambahan sarana wireless tanpa kabel untuk keperluan rapat rapat dinas,
2. Pergantian berbagai sarana dan prasarana kebutuhan pendukung gedung kantor seperti tempat parkir kendaraan yang memadai.

### **1.6. Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemantren Ngampilan pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2021 Kemantren Ngampilan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.618.206.977,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.6.095.612.477,- dan belanja modal sebesar Rp.1.522.594.500,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang mendukung IKU Kemantren berasal dari APBD sebesar Rp.2.516.260.843,- yang didukung oleh 3 program dan 7 kegiatan.

### **1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.



## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi kemantren Ngampilan, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## LAMPIRAN



# BAB II

## PERENCANAAN

## DAN PERJANJIAN KINERJA

### *Bab 2 Berisi :*

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2021*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2021*
4. *Instrumen Pendukung*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2021, Kemantren Ngampilan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Ngampilan Tahun 2017-2022. Renstra Kemantren Ngampilan merupakan manifestasi komitmen Kemantren Ngampilan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kemantren Ngampilan Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kemantren Ngampilan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kemantren Ngampilan Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.



### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel II.1  
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kemantren Ngampilan mendukung pencapaian 7 misi tersebut dan 12 Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
2. Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan
3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatkan
4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan
6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun
7. Kualias Pendidikan Meningkatkan
8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan
9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian
10. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan
11. Infrastruktur Wilayah Meningkatkan
12. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

#### **Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kemantren Ngampilan selama 5 tahun anggaran adalah :

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan

#### **Sasaran Strategis**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:





Tabel II.2  
Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Tingkat perkembangan Pembangunan kemantren Ngampilan meningkat		388,5	388,5	389	389	389	389
1		Tingkat swadaya masyarakat	28,63%	28,63 %	28,63 %	28,65 %	28,65 %	28,65 %
2		Nilai survei kepuasan masyarakat	81,12	81,25	83,20	83,80	84,15	85,00

### 2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel II.3  
Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Tingkat perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren  2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Mantri Pamong Praja



1	2	3	4
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan
			2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (murni)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	389



Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat target pencapaian Indikator Program sebagai berikut:

Tabel II.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET TAHUNAN</b>
1	Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Ngampilan Meningkat	Nilai survei kepuasan masyarakat	84.15
2	Pelanggaran Perda di Kemantren Ngampilan Menurun	Jumlah Pelanggaran Perda	72
3	Swadaya masyarakat Kemantren Ngampilan meningkat	Angka swadaya Murni	684.460.000

### 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021



Pada tahun 2021, Kemantren Ngampilan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan dalam rangka memenuhi target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	2	3	5
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	389

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat target pencapaian Indikator Program sebagai berikut:

Tabel II.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN
1	Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Ngampilan Meningkat	Nilai survei kepuasan masyarakat	84.15
2	Pelanggaran Perda di Kemantren Ngampilan Menurun	Jumlah Pelanggaran Perda	72
3	Swadaya masyarakat Kemantren Ngampilan meningkat	Angka swadaya Murni	684.460.000



Untuk mendukung sasaran strategis tersebut Kemantren Ngampilan memiliki 3 program utama sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 565.351.266,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 1.700.447.505,-
3. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 250.462.072,-

Adapun capaian dari sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel II.7 Capaian dari sasaran strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	Capaian
1	Kepuasan Layanan Masyarakat di kemantren Ngampilan Meningkat	Nilai survei kepuasan masyarakat	84.15	84.16
2	Pelanggaran Perda di Kemantren Ngampilan Menurun	Jumlah Pelanggaran Perda	72	70
3	Swadaya masyarakat Kemantren Ngampilan meningkat	Angka swadaya Murni	684.460.000	692.230.000

Dari capaian sasaran strategi Kemantren Ngampilan dapat mencapai target dan semua melebihi dari target. Meski pada tahun 2021 ini pandemi masih ada namun pada tribulan IV sudah dapat terkendali sehingga nilai swadaya murni masyarakat dapat mencapai target dan bahkan melebihi target.

#### **2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021**

Pada Tahun Anggaran 2021 Kemantren Ngampilan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.7.306.271.629,- dengan rincian



Belanja Operasi Rp.5.934.683.629,- dan Belanja Modal Rp.1.371.588.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp.7.618.206.977,-, dengan rincian Belanja Operasi Rp.6.095.612.477,- dan Belanja Modal Rp.1.522.594.500,-.

## **2.5 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2021**

Pada Tahun Anggaran 2021 Kemantren Ngampilan melaksanakan kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp.7.618.206.977,- dengan rincian



Belanja Operasi Rp.6.095.612.477,- dan Belanja Modal Rp.1.522.594.500,-.

### 2.5.1 Target Belanja Kemantren Ngampilan

Tabel II.8

Target Belanja Kemantren Ngampilan APBD Perubahan Tahun 2021

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Operasi	Rp.6.095.612.477,-	80.01%.
Belanja Modal	Rp.1.522.594.500,-	19.99%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.7.618.206.977,-</b>	<b>100%</b>

### 2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kemantren Ngampilan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.9

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Rp.2.516.260.843 ,- ,-	33.02 %	Anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi

Keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan oleh Kemantren Ngampilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran renstra tercermin dari tingkat perkembangan pembangunan yang semakin baik. Berikut tabel terkait tujuan dan sasaran Kemantren Ngampilan :



**Tabel II.10**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Anggaran</b>
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Ngampilan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 118.629.400
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 133.611.586
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Mantri Pamong Prajat	Rp. 303.110.280
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 149.712.072
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 100.750.000
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan	Rp. 959.174.505
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan	Rp. 741.273.000

### **2.6. Instrumen Pendukung**

Instrumen pendukung yang ada antara lain sarana dan prasarana yang memadahi dan dukungan SDM seluruh pegawai Kemantren Ngampilan yang penuh dedikasi dan komitmen tinggi.





# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2021*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021**

Kemantren Ngampilan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Ngampilan tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh kemantren Ngampilan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja



dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kemantren Ngampilan beserta target dan capaian realisasinya.

Kemantren Ngampilan menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung terwujudnya misi 1 yaitu : “Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat” melalui program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat memiliki implikasi yang sangat kompleks sehingga melibatkan peran perangkat daerah lintas sektor.

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kemantren Ngampilan. Rencana Kerja, target dan capaian realisasi anggaran Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021 menampung 4 (empat) program dan 11 (sebelas kegiatan), dengan perincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.2  
Capaian Target Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Nama Program	Kegiatan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.125.000	12.900.000	98,29
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.775.144.684	3.502.637.077	92,78



		Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.112.522	148.565.955	95,78
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.254.500	141.905.000	95,08
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.037.424	240.507.686	89,40
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	740.272.004	722.580.754	97,61
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 118.629.400	Rp. 103.218.400	87.01%
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 133.611.586	Rp. 132.471.410	99.15%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Rp. 313.110.280	Rp. 306.562.249	97.90%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 149.712.072	Rp. 135.424.680	90.45%
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 100.750.000	Rp. 96.850.000	96.12%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan	Rp. 959.174.505	Rp. 851.156.563	88.74%



		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan	741.273.000	Rp. 715.274.766	96.49%
	Jumlah Total		Rp. 2.516.260.843	Rp. 2.340.958.068	93.03%

Tabel III.3  
Capaian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N
1	2	3	5	6	7
	Tingkat perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389	396.5	101.92%

Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan terealisasi melebihi target dikarenakan adanya koordinasi yang lebih baik antara stakeholder sehingga mendukung tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan. Meskipun demikian masih ada beberapa kegiatan yang belum bisa terealisasi sesuai target .

Ada beberapa faktor penghambat sehingga sebagian target tersebut tidak tercapai disebabkan adanya kendala antara lain :

1. Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
2. Adanya penyebaran pandemi covid 19 yang cukup masif dari awal tahun sampai dengan triwulan ke tiga tahun 2021 belum berakhir, sehingga segala kegiatan dan aktivitas yang menimbulkan kerumunan diminimalkan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelatihan/bimtek ketrampilan



4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi.
5. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang parsial sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat kurang optimal.
6. Kebijakan dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengalihkan Belanja Hibah ke dalam Belanja Langsung Kelurahan memberikan efek negatif sehingga warga masyarakat kurang bersemangat dalam partisipasi pembangunan yang dilaksanakan.

Beberapa Faktor pendorong yang mempengaruhi tingkat keberhasilan antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen dan semangat pegawai yang masih produktif dan berdedikasi tinggi.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik dengan melibatkan semua PPTK dan petugas urusan kegiatan
3. Kebijakan Gandeng Gendong yang dilaksanakan untuk mengangkat ekonomi masyarakat telah menumbuhkan empati dan semangat partisipasi warga sekitar di wilayah kemantren.
4. Pelaksanaan kegiatan yang banyak melibatkan partisipasi masyarakat sehingga menumbuhkan rasa kepedulian pada pelaksanaan pembangunan wilayah.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemantren Ngampilan untuk mendukung capaian target nasional dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, target Provinsi DIY dan target RPJMD Kota Yogyakarta secara riil adalah dengan melakukan penajaman terhadap sub kegiatan yang ada dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Ngampilan. Berkaitan dengan hal tersebut maka program eksternal yang dilakukan harus sinergis dengan renstra Kemantren Ngampilan yang mengacu pada dokumen perencanaan instansi di atasnya. Proses perencanaan melibatkan



masyarakat di tingkat RW melalui penjaringan aspirasi (musrenbang) dan sinkronisasi program dengan perangkat daerah lintas sektor adalah proses perencanaan yang menggabungkan antara sistem *Bottom up* dan *Top Down* dan hasil perencanaan tersebut tertuang dalam program/kegiatan eksternal dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Ngampilan.

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dapat terwujud melalui program dan kegiatan, baik itu program utama maupun program pendukung. Adapun program-program tersebut adalah:

1. Program Utama
  - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Pendukung

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kemantren Ngampilan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Analisa per sasaran strategis**

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kemantren Ngampilan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

1. Kemiskinan Masyarakat Menurun dengan indikator capaian sasaran: Angka kemiskinan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 588 Tahun 2018 Tentang Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan



Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kemantren Ngampilan yang menjadi dasar pemberian bantuan di tahun 2021.

Tabel III.4  
Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta  
Tahun 2020

No	Kec./Kel.	KMS 3	KMS 2	KMS 1	Jumlah
1	Kemantren Ngampilan	352	95	0	477
	Kelurahan Ngampilan	215	43	0	258
	Kelurahan Notoprajan	137	52	0	189
	Jumlah Total	704	190		924

Untuk mengurangi besarnya angka kemiskinan tersebut, baik Kemantren maupun Kelurahan membuat kegiatan-kegiatan yang diantaranya pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Pelatihan yang diadakan juga menggunakan SIM Pemberdayaan yang mana memuat data penduduk KMS yang wajib ikut dalam pelatihan.

Tabel dibawah menunjukkan jumlah keluarga miskin tahun 2021 yaitu Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2021, yang mana mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Tabel III.5  
Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta  
Tahun 2021

No	Kec./Kel.	KMS 3	KMS 2	KMS 1	Jumlah
1	Kemantren Ngampilan	334	88	0	422
	Kelurahan Ngampilan	182	55	0	235
	Kelurahan Notoprajan	154	33	0	187
	Jumlah Total	668	176		884

Dengan melihat data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk miskin di Kemantren Ngampilan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari jumlah KMS ! dan 2 : 924 KK turun menjadi 884 KK. Dalam situasi Pandemi Covid19 yang melanda bahkan memuncak pada pertengahan tahun 2021 ini dan berhasil melandai pada tribulan ke empat, Pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan, dengan berbagai kebijakan belanja anggaran telah mampu meningkatkan kondisi kesejahteraan warga masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang m e n i n g k a t pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Ketahanan Pangan Masyarakat dapat dipertahankan dengan indikator capaian sasaran: Pola pangan harapan

Pada tahun 2021, 2 (dua) kelurahan di Kemantren Ngampilan menggunakan dana APBD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka recovery ekonomi pasca covid19. Kegiatan tersebut diantaranya, Pelatihan membuat batik ecoprint, Pendampingan lorong sayur dan Pemeliharaan Conblok, Pemeliharaan SAH dan Rehab Balai RW, pemeliharaan Ruang publik dan pemeliharaan SPAH di kampung Pathuk yang bertujuan selain untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat juga untuk upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid 19 sebagai kebutuhan mendesak warga.





3. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun dengan indikator capaian sasaran: Angka kriminalitas, Jumlah pelanggaran Perda

Seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Strategis, bahwa secara rutin kemantren Ngampilan akan mengadakan penertiban pondokan penataan PKL, penertiban reklame dan IMB. Dengan berjalannya semua kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan bantuan dari BKO Satpol Pamong Praja diharapkan akan mampu menekan angka kriminalitas di kemantren Ngampilan. Kegiatan penertiban yang rutin dijalankan juga bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran Perda. Kegiatan tersebut juga dilaporkan secara rutin untuk mengetahui sejauh mana penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah. Adapun target jumlah pelanggaran perda pada tahun 2021 sejumlah 72 dan tercapai 70 pelanggaran. Sehingga Kemantren Ngampilan sudah bias menurunkan angka pelanggaran perda pada tahun 2021.

4. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat dengan indikator capaian sasaran: Persentase rintisan desa budaya yang aktif

kemantren Ngampilan merupakan salah satu kawasan cagar budaya, yang mana banyak terdapat situs budaya yang harus dilestarikan. Peran kemantren diantaranya adalah melestarikan bangunan berciri khas Yogyakarta, mendorong kegiatan kelompok-kelompok kesenian maupun melestarikan makanan khas Ngampilan.

5. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat dengan indikator capaian sasaran: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
6. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat dengan indikator capaian sasaran: Indeks kualitas lingkungan hidup
7. Infrastruktur Wilayah Meningkat dengan indikator capaian sasaran: Indeks infrastruktur wilayah



8. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat dengan indikator capaian sasaran: Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah

Kemantren Ngampilan telah memiliki tingkat indikator capaian sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 84,16 dengan capaian 100 % dari target ( Hasil IKM Terlampir) dan Angka swadaya masyarakat yang mengalami peningkatan menjadi Rp.692.230.000,- dengan capaian sebesar 101,13% dari target.

Rencana Strategis Kemantren Ngampilan juga mengacu pada renstra Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya mewujudkan target nasional. Kementerian Dalam Negeri memiliki 12 sasaran strategis dan Kemantren Ngampilan memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran Kementerian Dalam Negeri tersebut yaitu :

- Sasaran 1: Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

Kemantren Ngampilan memiliki fungsi untuk pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kemantren Ngampilan. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya menjamin stabilitas keamanan dan penciptaan suasana kondusif dalam rang mengantisipasi timbulnya gejolak berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang rawan terjadi. Beberapa hal yang dilakukan kemantren Ngampilan untuk mendukung sasaran ini :

- a. Menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan generasi mudadengan pembinaan generasi muda dan karang taruna.
- b. Memanfaatkan potensi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar tidak timbul upaya disintegrasi bangsa.
- c. Melakukan mediasi warga untuk meminimalisir dan menangani konflik yang terjadi di wilayah yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya/kultur.



d. Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban.

- Sararan 3: Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu indikator sasaran ini adalah tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemantren Ngampilan memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum kepada masyarakat, berkewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam rangka mendukung sasaran ini kemantren Ngampilan melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada penciptaan *Good goverment* dan *Good Governance* yang mengedepankan kepastian prosedur, layanan, pembiayaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

- Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Beberapa indikator dari sasaran ini adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Peningkatan Mutu (SPM), penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dan persentase penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. kemantren Ngampilan sebagai penyelenggara layanan masyarakat sangat berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan sasaran ini selaras dengan misi 1 Walikota Yogyakarta yang berupaya menumbuhkan keberdayaan warga masyarakat. kemantren Ngampilan merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung misi ini sehingga upaya yang dilakukan juga



selaras dengan sasaran 4 Kemendagri. Meskipun demikian untuk bidang ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran hanya sebagai *supproting unit* dari Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Yogyakarta.

- Sasaran 7: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Kemantren Ngampilan memiliki kewenangan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat karena kelurahan merupakan bagian dari kemantren. Dalam mendukung sasaran ini kemantren Ngampilan melakukan beberapa langkah :

1. Melakukan pembinaan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
2. Melakukan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPP
4. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.

- Sasaran 8: Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Kemantren sebagai garda depan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran ini karena kemantren menjadi penggerak bagi warga masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan melalui perekaman KTP Elektronik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan database kependudukan yang akurat. Kegiatan yang dilakukan kemantren Ngampilan untuk mendukung sasaran ini adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dan memanfaatkan



forum-forum pertemuan warga untuk memberikan informasi pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat dan pentingnya perekaman E-KTP sebagai *single identity* untuk pengurusan semua dokumen. kemantren Ngampilan melakukan pelayanan perekaman E-KTP dan melakukan distribusi serta verifikasi data kependudukan, hal ini merupakan bagian dari fungsi kemantren Ngampilan sebagai penyelenggara layanan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kemantren Ngampilan memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian target nasional khususnya sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri terutama untuk sasaran 7 dan 8 karena kemantren memiliki kewenangan terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan memiliki keterkaitan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi garda depan validasi dan akurasi data kependudukan. Kemantren Ngampilan juga menjadi pendukung untuk pencapaian sasaran 1, 3 dan 4 Kemendagri meskipun tidak secara langsung karena kewenangan yang ada di kemantren bersifat parsial dan hanya mendukung output dari instansi teknis.



Referensi renstra lembaga lain pada Tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan, Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah "Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas". Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Sasaran Biro Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah
3. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah

Berkaitan dengan sasaran tersebut maka Kemantren Ngampilan memiliki keterkaitan untuk turut mewujudkan sasaran tersebut karena kewenangan dan fungsi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kemantren dan melakukan pelayanan berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai *supporting unit* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Kemantren Ngampilan melakukan upaya untuk mendukung sasaran tersebut dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara akuntabel dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kemantren Ngampilan juga berupaya meningkatkan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan dengan melakukan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dan berorientasi pada *output* dan *outcome*, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan secara berkala agar capaian target sesuai yang direncanakan. Dengan demikian Kemantren



Ngampilan memiliki keterkaitan secara langsung untuk mendukung terwujudnya sasaran dari Biro Tata Pemerintahan DIY dalam hal peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat, meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan dalam meningkatkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan strategis merupakan dasar bagi Kemantren Ngampilan dalam menyusun program dan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan mantri pamong praja Ngampilan dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis sangat bermanfaat dalam menyelaraskan kebijakan Kemantren Ngampilan dalam mengoptimalkan potensi dan peluang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Kemantren Ngampilan adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kemantren Ngampilan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Jawatani di Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Ngampilan yang memuat program dan kegiatan.



Tabel III.6  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian output yang dilaksanakan Kemantren Ngampilan Tahun 2021 diperoleh nilai dengan predikat sangat berhasil karena semua perencanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, meskipun capaian keuangannya tidak terserap secara keseluruhan.

Sedangkan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian IKU secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III.7  
Pencapaian IKU Kemantren Ngampilan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389	396.5	101.92 %





Dari tabel diatas pencapaian IKU Kemantren Ngampilan Tahun 2021 mencapai 101.92% dalam kategori Berhasil, nilai tersebut merupakan hasil dari evaluasi diri yang dilakukan oleh kelurahan-kelurahan. Pencapaian IKU Kemantren Ngampilan Tahun 2021 ini mengalami kenaikan, meski di tengah krisis dan pandemi Covid 19 ini namun kinerja Kemantren Ngampilan justru meningkat. Kenaikan ini disebabkan adanya kerjasama semua tim yang terlibat dan juga peran aktif masyarakat. Evaluasi Kelurahan merupakan salah satu parameter penilaiankelurahan yang meliputi beberapa bidang yaitu :

1. Pemerintahan Umum
2. Kemasyarakatan
3. Kewilayahan

Variabel penilaian dari ketiga bidang tersebut telah mampu merepresentasikan kondisi kelurahan secara makro sehingga dari hasil penilaian di tingkat kelurahan tersebut akan dapat menentukan tingkat kemajuan perkembangan kelurahan dan kemantren secara umum.

Kinerja sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.8  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi *		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Ngampilan	389	389	396.5	101.92	389	101.92



### 3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Operasi pada tahun 2021 sebesar 93.58% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran belanja modal sebesar 92,81%. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 93.03%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93.48%.

Tabel III.9

Realisasi Anggaran Kemantren Ngampilan Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian%	Capaian% Tahun sebelumnya
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
1	OPERASI	6.095.612.477,	5.704.389.591	391.222.886	93.58	95.32
2	BELANJA MODAL	1.522.594.500	1.413.131.263.54	109.463.236	92.81	98.19
	JUMLAH	7.618.206.977	7.117.520.854.54	500.686.122	93.43	96.96

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:



Tabel III.10

Realisasi Tahun 2021 dibandingkan Target capaian Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Anggaran (%)	Capaian Kinerja Anggaran sebelumnya (2020) (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.125.000	12.900.000	98,29	96.35
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.775.144.684	3.502.637.077	92,78	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.112.522	148.565.955	95,78	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.254.500	141.905.000	95,08	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.037.424	240.507.686	89,40	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.272.004	722.580.754	97,61	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Rp. 118.629.400	Rp. 103.218.400	87.01%	96.66



	ahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kemantren				
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 133.611.586	Rp. 132.471.410	99.15%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada mantri pamong praja	Rp. 313.110.280	Rp. 306.562.249	97.90%	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 149.712.072	Rp. 135.424.680	90.45%	96.66
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 100.750.000	Rp. 96.850.000	96.12%	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan	Rp. 959.174.505	Rp. 851.156.563	88.74%	96.66
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan	741.273.000	Rp. 715.274.766	96.49%	
	Jumlah Total		Rp. 2.516.260.843	Rp. 2.340.958.068	93.03%	96.96

Catatan : Untuk Program Kemantren pada tahun 2021 berbeda dengan Program pada Tahun 2020 sehingga perbandingan capaian tidak bisa kami tampilkan per kegiatan.



Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel III.11  
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389	396.5	101.92	2.516.260.843	2.340.958.068	93.03 %
<b>Jumlah</b>						2.516.260.843	2.340.958.068	93.03 %

Catatan : Anggaran adalah anggaran per sasaran PD



### 3.4 Akuntabilitas Anggaran

Tabel III.12  
Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	101.92	93.03	6.97%

#### Analisis Efisiensi

1. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat, Telah mencapai kinerja sebesar 101.92% dengan efisiensi anggaran 6.97%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui penghematan dari belanja penggandaan dan belanja jamuan makan minum rapat serta sisa kontrak hasil negosiasi harga.
2. Tingkat penyerapan anggaran dengan capaian realisasi keuangan mencapai 93.03%. Hal ini bisa dikategorikan sangat baik karena adanya deviasi di bawah 10% dari target seluruh anggaran. Berikut data realisasi anggaran per program dan penjelasannya:



Tabel III.13  
Realisasi Pelaksanaan Program Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp.)	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Anggaran (%)	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.125.000	12.900.000	98,29	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.775.144.684	3.502.637.077	92,78	Kegiatan Rapat dikurangi volumenya dan memanfaatkan teknologi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.112.522	148.565.955	95,78	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.254.500	141.905.000	95,08	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.037.424	240.507.686	89,40	a. Belanja Alat listrik dan elektronik disesuaikan dengan kebutuhan. b. Belanja jasa listrik, telepon, dan



						air menyesuaikan dengan tagihan per bulan. c. Belanja STNK terutama untuk penggantian plat dan STNK, biaya tidak sebesar yang direncanakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	740.272.004	722.580.754	97,61	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren	Rp. 118.629.400	Rp. 103.218.400	87.01%	Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan keadaan pandemi
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 133.611.586	Rp. 132.471.410	99.15%	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada mantramong Praja	Rp. 313.110.280	Rp. 306.562.249	97.90%	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 149.712.072	Rp. 135.424.680	90.45%	Kegiatan rapat sebagian tidak terserap karena menggunakan





	Umum					teknologi untuk menghindari penyebaran Covid 19
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 100.750.000	Rp. 96.850.000	96.12%	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan	Rp. 959.174.505	Rp. 851.156.563	88.74%	Kegiatan Fisik tidak terserap penuh karena menyesuaikan dengan hasil lelang
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan	741.273.000	Rp. 715.274.766	96.49%	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
	Jumlah Total		Rp. 7.618.206.977	Rp. 7.117.520.854.54	93.43%	

### 3.5 Perbandingan Capaian Anggaran Kemantren Ngampilan dengan Kemantren di Kota Yogyakarta

Capaian realisasi anggaran tahun 2021 dari 14 Kemantren adalah sebagai berikut:

1. Kemantren Kotagede : 98,66 %
2. Kemantren Pakualaman : 98,37 %
3. Kemantren Gondokusuman : 97,89 %
4. Kemantren Gedongtengen : 97,64 %
5. Kemantren Gondomanan : 97,59 %
6. Kemantren Jetis : 97,40 %
7. Kemantren Tegalrejo : 96,61 %
8. Kemantren Umbulharjo : 96,51 %



9. Kemantren Mergangsan	: 96,18 %
10. Kemantren Wirobrajan	: 95,97 %
11. Kemantren Kraton	: 95,91 %
12. Kemantren Mantrijeron	: 93,86 %
13. Kemantren Ngampilan	: 93,84 %
14. Kemantren Danurejan	: 92,28 %

Data capaian anggaran di atas dari sim pelaporan Kota Yogyakarta dengan perhitungan dikurangi gaji. Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kemantren Ngampilan menduduki posisi ke 13 dari 14 Kemantren yang ada. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang dikurangi volumenya dikarenakan keadaan pandemi.



### 3.6 Inovasi

Pada era pandemi yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Kemantren Ngampilan ini memunculkan ide serta gagasan baru. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2021 ini, Kemantren Ngampilan telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

- a. Inovasi Pelaksanaan Vaksin Massal untuk menekan Covid 19 di Kemantren Ngampilan yang dilaksanakan enam kali bagi warga masyarakat di wilayah Kemantren Ngampilan
- b. Inovasi Layanan  
Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, di tengah pandemi ini warga dituntut untuk bisa mengaplikasi layanan melalui ponsel masing-masing. Namun demikian masih ada warga yang belum bisa mengaplikasikan JSS untuk pelayanan, untuk itu Kemantren Ngampilan memberikan layanan pendampingan bagi warga yang belum bisa mengaplikasikan program layanan tersebut di kemantren setiap jam pelayanan.

### 3.7. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemantren Ngampilan

Hasil Evaluasi:

- a. Belum mempublikasikan Perjanjian Kinerja pada website Kemantren Ngampilan
- b. Belum memberikan reward dan punishment pada capaian program dan sasaran IKU.
- c. Agar menyajikan informasi data kinerja sesuai dengan kinerja yang sudah diperjanjikan di dalam Laporan Kinerja.
- d. Laporan kinerja agar menyajikan analisis capaian kinerja outcome dan output penting secara memadai baik mengenai capaian kinerja sasaran maupun capaian kinerja program.
- e. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi internal yang telah dilaksanakan dengan melengkapi bukti yang cukup atas hasil evaluasi.
- f. Meningkatkan capaian kinerja



Tindak Lanjut:

- Tahun 2021 ini Kemantren Ngampilan telah memberikan reward berupa piagam penghargaan terhadap PPTK yang berhasil mencapai target keuangan mencapai 97% lebih.
- Pada tahun 2021 Kemantren Ngampilan sudah menyajikan informasi data kinerja sesuai dengan kinerja yang sudah diperjanjikan di dalam Laporan Kinerja.
- Laporan kinerja tahun 2021 sudah menyajikan analisis capaian kinerja outcome dan output penting secara memadai baik mengenai capaian kinerja sasaran maupun capaian kinerja program.
- Kemantren Ngampilan telah melaksanakan evaluasi internal setiap bulan yang telah dilaksanakan dengan melengkapi bukti yang cukup atas hasil evaluasi.
- Untuk meningkatkan capaian kinerja Kemantren Ngampilan telah berusaha dengan sebaik-baiknya namun dikarenakan adanya beberapa kendala sehingga pada tahun ini mengalami penurunan dari sisi penyerapan anggaran. Namun dari sisi angka kemiskinan warga masyarakat telah mengalami perbaikan dibanding tahun 2020 dengan angka KMS yang menurun.

### **3.8. Kolaborasi Lintas Sektor Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Kemantren Ngampilan**

Untuk mencapai kinerja Kemantren Ngampilan tahun 2021 selalu berkolaborasi dengan lintas sektor antara lain:

- Kantor Urusan Agama
- Polisi Sektor
- Komando Rayon Militer
- LPMK
- RT
- RW
- Organisasi Kampung
- PKK Kecamatan dan PKK kelurahan
- Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat
- Komisi Lansia
- Karang Taruna



- Forum Paud
- Paguyuban Kesenian
- Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia Tingkat Kemantren
- Forum Kemantren Inklusi



# BAB IV

## PENUTUP

### **Bab 5 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Kemantren Ngampilan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Kemantren Ngampilan Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kemantren Ngampilan tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai bahwa adanya beberapa indikator kinerja yang belum tercapai maksimal karena belum memenuhi target. Tidak tercapainya sebagian target tersebut disebabkan oleh berbagai faktor hambatan dan kendala yang ada, dikarenakan :

- 1) Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
- 2) Adanya penyebaran pandemi covid 19 yang cukup masif dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2021 belum berakhir, sehingga segala kegiatan dan aktivitas yang menimbulkan kerumunan diminimalkan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelatihan/bimtek ketrampilan
- 4) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi.
- 5) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang parsial sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat kurang optimal.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan untuk pengisian Jabatan PPTK Kegiatan dengan personil pegawai yang masih produktif dan berdedikasi tinggi.



- 2) Meningkatkan Monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik dengan melibatkan semua PPTK dan petugas urusan kegiatan
- 3) Mengusulkan dilaksanakannya evaluasi terhadap program pemberian TPP bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang lebih proporsional dan berimbang sesuai beban kerja.
- 4) Mengusulkan adanya evaluasi grading TPP bagi pegawai karena menimbulkan suasana psikologis yang meresahkan pegawai. Grading TPP menimbulkan gejala apabila ada mutasi seringkali pegawai tidak mau dimutasi dikarenakan ada penurunan pendapatan atau pegawai mendapatkan promosi jabatan di OPD lain tetapi justru pendapatannya menurun.
- 5) Melaksanakan pendokumentasian kegiatan secara lebih baik dan lebih tertib administrasi.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di OPD secara berkala.
- 7) Meningkatkan kualitas administrasi penatausahaan keuangan untuk semua kegiatan di OPD dengan koordinasi dan evaluasi pengelola keuangan kegiatan secara berkala.



**LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 4. Piagam Penghargaan

Lampiran 5, Hasil SKM

Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 7. Rapat Evaluasi internal Capaian Kinerja

Lampiran 8. Pengukuran Kinerja

Lampiran 9. SOP Pengumpulan Data kinerja

Lampiran 10 Daftar Penghargaan / Prestasi

Lampiran 11. Matrik Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2020






LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN  
MANTRI PAMONG PRAJA  
NGAMPILAN  
NOMOR :  
/KPTS/NG/2021  
TANGGAL :  
Januari 2021

KEMANTREN NGAMPILAN  
SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI  
DAN PELAPORAN  
SEKRETARIAT KEMANTREN  
NGAMPILAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN  
KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)

PENGUMPULAN DATA KINERJA

Nomor SOP	/KPTS/NG/2021		<b>KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA</b>  <b>SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT KEMANTREN NGAMPILAN</b>
Tanggal Pembuatan	Januari 2021		
Tanggal Revisi	Januari 2021		
Tanggal Efektif	Januari 2021		
Disahkan Oleh	Mantri Pamong Praja Ngampilan		
<b>Nama SOP : Pengumpulan Data Kinerja</b>			

<b>Dasar Hukum :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENPAN RI Nomor M.PAN/21.II.2008</li> <li>2. Peraturan Walikota Yogyakarta 14 TAHUN 2013 Tentang SOP</li> </ol>
<b>Keterkaitan dengan SOP lain</b>
SOP Penyusunan Laporan Keuangan
<b>Pencatatan dan Pendapatan</b>

<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA</li> <li>2. D-3</li> <li>3. S1</li> </ol>
<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda</li> <li>2. Buku Ekspedisi</li> <li>3. Kartu Ekspedisi</li> <li>4. Komputer ,Almari A</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Validitas pengumpulan data dan isi laporan tidak masalah</li> <li>2. Tidak mematuhi tata tertib</li> </ol>

Mantri Pamong Praja Ngampilan

No	Kegiatan	Pelaksana				
		Mantri Pamong Praja	PPTK	Sub Bag Keuangan Perencanaan & Pelaporan	Sub bag Umum dan Kepegawai	Mantri An
1.	Rakor Teknik pengumpulan data kinerja.					
2.	Penyelesaian Administrasi data kinerja					
3.	Pengumpulan dan pengolahan data kinerja.					
4.	Penyusunan Pengetikan data kinerja					
5.	Verifikasi Draft data kinerja					
6.	Penandatanganan data kinerja					
7.	Penggandaan data kinerja untuk pembuatan AKIP					
8.	Pengarsipan					

Mantri Pamong Praja Ngampilar

